



Nyali Pemkot Diuji

- Proyek Bangunan Tanpa IMB Jalan Terus
- Hotel Lantai 8 Dibangun Dekat Kantor DPRD

TAK BERIZIN

- Sebuah hotel berantai delapan yang diduga tak berizin bakal berdiri di dekat kantor DPRD Kota Yogya di jalan Ipda Tut Harsoyo.
- Meski tak memiliki IMB, proyek tersebut hingga saat ini masih berjalan.
- Dinas Perizinan menyatakan telah mencabut IMB dari bangunan hotel ini.
- Izin dicabut lantaran bangunan tersebut akan digunakan untuk hotel dan melanggar moratorium pengajuan izin hotel baru.
- Pihak pengelola mengaku telah menghubungi Pemkot dan masih akan mempelajari pencabutan izin.
- Pengelola mengaku meminta izin agar proyek tetap berjalan dengan berbagai alasan. Pihak dewan menunggu ketegasan Pemkot menyikapi masalah ini.

YOGYA, TRIBUN - Sebuah proyek pembangunan yang ada di Jalan Ipda Tut Harsono, Kelurahan Muja-Muja, Kecamatan Umbulharjo, terus berjalan meski tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Bangunan yang informasinya akan dijadikan sebagai hotel delapan lantai ini terancam disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) setempat.

Pantauan *Tribun Jogja*, proyek pembangunan ini masih terus berjalan hingga Senin (9/1). Hal ini terlihat dari aktivitas pekerja yang tampak sedang mengerjakan bangunan begitu pintu gerbang dari seng itu dibuka. Sementara, beberapa truk pengangkut material



TRIBUN JOGJA / AGUNG ISMIYANTO

ILEGAL - Sebuah proyek pembangunan hotel yang diduga tak berizin tengah berlangsung tak jauh dari Kantor DPRD Kota Yogya, Senin (10/1).

juga masih keluar masuk membawa material untuk bangunan gedung yang berada di dekat

kantor DPRD dan Pemkot

● ke halaman 14

GRAFIS/TAUZIARAKHMAN

Allegorita

Sifat

Tindak Lanjut

Nyali Pemkot Diuji

● Sambungan Hal 13

tempat ini.

Di sisi lain, ada spanduk putih bertuliskan "Hentikan Bangunan Hotel!! Melanggar Perizinan IMB". Tulisan berwarna merah dengan cetak tebal tersebut dipasang untuk menunjukkan jika memang pembangunan gedung hotel ini tidak mengantongi IMB.

"Kami telah mencabut IMB dari bangunan hotel ini. Sehingga statusnya saat ini tidak ada IMBnya," kata Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Heri Karyawan, Senin (9/1).

Menurut Heri, pencabutan IMB untuk proyek pembangunan ini pun telah

melalui mekanisme yang ada. Yakni, didahului dengan melayangkan surat peringatan hingga tiga kali. Dja menjelaskan, pencabutan IMB dilakukan karena berdasar pengawasan tim dari Dinas Perizinan, konstruksi bangunan yang dibangun ternyata tidak sesuai dengan permohonan awal yang mengajukan izin mendirikan bangunan satu lantai.

Dinzin cabut izin

Pihaknya memastikan selama moratorium masih berlangsung hingga 31 Desember 2017, pihaknya tidak akan memproses permohonan izin pembangunan hotel baru. Hal ini mengingat akhir tahun lalu wali kota memutuskan memperpanjang morato-

rium pembangunan hotel baru di Kota Yogyakarta hingga 31 Desember 2017.

"Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel," jelasnya.

Dikonfirmasi terkait proyek bangunan hotel tak berizin, Penjabat Wali Kota, Sulistyono menegaskan jika aturan yang ada di Pemkot setempat harus dipatuhi. Pun demikian halnya terkait dengan pembangunan hotel yang tak mengantongi IMB ini.

"Jika memang terbukti tak berizin, harus dihentikan (proyeknya). Harus sesuai aturan yang ada lah," kata Sulistyono.

Dia juga menegaskan jika pihaknya berupaya

untuk menegakkan aturan. Jika memang terbukti tidak mengantongi IMB, maka sudah semestinya instansi terkait dalam hal ini Sat Pol PP setempat menindak tegas investornya.

"Nanti menjadi ranah Sat Pol PP untuk menindak sesuai Perdanya," jelasnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Agusnur mendesak Pemkot untuk tegas dalam menegakkan aturan terkait dengan proyek bangunan tersebut. Dia pun meminta jajaran Sat Pol PP untuk menindak lanjut persoalan perizinan ini.

"Harus segera ditertibkan jika melanggar. Pemkot juga harus tegas jika ada bangunan tak berIMB," tegasnya. (ais)

Kami Minta Izin Tetap Lanjutkan Proyek

PIHAK Hotel Grand Timoho, pengelola bangunan proyek yang saat ini tengah disorot mengaku sudah ditemui oleh pihak Dinas Perizinan (Diszin) dan Sat Pol PP Kota Yogyakarta terkait dengan proyek pembangunan hotel tersebut. Inti dari pertemuan tersebut, pihak Diszin memanggil pihak hotel berkaitan perizinan, Kamis (12/1) mendatang.

"Kami sudah mendapatkan surat dari Dinzin jika IMB kami dicabut dan kami masih mempelajarinya. Sat Pol PP juga sudah menemui kami hari ini (kemarin). Kami juga mendapat surat panggilan dari

Diszin untuk menghadap Kamis mendatang," ujar Humas Hotel Grand Timoho, Adi Ramadan saat dihubungi, Senin (9/1) sore.

Dia menjelaskan, meski ada permintaan penghentian pengerjaan, pihaknya sementara waktu meminta izin untuk melanjutkan proyek ini. Pasalnya, ada beberapa konstruksi yang sudah dibangun seperti penyangga.

"Kami khawatir kalau tidak dilanjutkan berdam-

● ke halaman 14

Kami Minta Izin Tetap Lanjutkan

● Sambungan Hal 13

pak pada lingkungan. Namun, dampaknya seperti apa orang teknik yang paham," kata Adi.

Sesuai prosedur

Sejauh ini, dia mengaku menjalankan pembangunan proyek sesuai dengan prosedur. Pihak pengelola pun mengklaim jika sudah mengantongi IMB terkait dengan proyek tersebut. Dia menjelaskan, pihaknya sudah

mengantongi persetujuan dari warga yang tinggal di sekitar proyek hotel tersebut. Yakni, warga Kampung Tegal Mlati, Muja-Muju, Umbulharjo.

Adapun, terkait spanduk penolakan, dia juga mengklaim jika pemasangnya bukan warga. Namun, pemilik gedung di samping hotel yang saat ini tengah dibangun.

"Kami sudah ada sosialisasi, namun yang bersangkutan tidak hadir. Kami juga sudah berupaya mendatangi pemilik gedung, namun belum ada titik temu. Kompen-

sasinya akan kami penuhi jika memang wajar," katanya.

Dia juga mengatakan jika berencana mengembangkan hotel menjadi enam lantai. IMB pengembangan hotel pun akan diajukan kembali setelah lantai bangunan lantai satu selesai.

Warga Dijanjikan kompensasi

Terpisah, Ketua RT 23 Kampung Tegal Mlati, Suparno menyatakan warganya sama sekali tidak keberatan atas pembangunan hotel. Di RTnya, ada sekitar 80 kepala keluarga yang

bermukim tepat di belakang lokasi hotel yang baru dibangun itu.

Menurut Suparno, warga tidak keberatan karena pihak hotel akan memberi kompensasi yang layak bagi warga dan membantu membangun infrastruktur kampung. Sejak pertengahan tahun lalu, pihak hotel sudah melakukan sosialisasi kepada warga sebanyak tiga kali.

"Memang sempat ada pertanyaan seputar IMB karena hanya bangunan satu lantai. Tapi IMBnya sudah diperbaiki. Warga tidak memperlakukannya," ujarnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005